



RINGKASAN

DHEA AMELIA. Sistem Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (*State Property Administration System In Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor*). Dibimbing oleh AGUS CAHYANA.

Barang Milik Negara (BMN) memiliki pengaruh yang cukup besar dalam laporan keuangan dan menjadi salah satu penunjang penerimaan negara. Untuk itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Barang perlu mengelola BMN dengan baik agar meminimalisir terjadinya kerusakan maupun kehilangan supaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun karyawan. Optimalisasi pengelolaan BMN dapat diwujudkan dengan dilakukannya penatausahaan BMN yang didalamnya terdapat prosedur inventarisasi untuk mengecek kualitas BMN secara berkala. Penatausahaan BMN merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan BMN.

Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan penatausahaan BMN, menjelaskan sistem penatusahaan BMN, meliputi; dokumen dan catatan yang digunakan, stakeholder yang terkait, prosedur, serta bagan alir/flowchart. menguraikan penggunaan aplikasi SIMAK-BMN pada proses penatausahaan BMN, menjelaskan penerapan pengendalian internal atas penatausahaan BMN, serta menguraikan masalah-masalah terkait penatausahaan BMN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung sejak 24 Januari sampai 19 Maret 2022.

Kebijakan penatausahaan terdiri dari kebijakan penyusutan dan kapitalisasi. Dalam kebijakan penyusutan dilakukan menggunakan metode garis lurus secara merata setiap semester selama masa manfaat. Kebijakan kapitalisasi telah diatur sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesin.

Sistem penatausahaan BMN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terdiri dari 3 bagian, dikerjakan oleh 5 fungsi terkait, menggunakan 7 dokumen, terdiri dari 12 prosedur. Aplikasi SIMAK-BMN sudah sangat membantu dalam pengerjaan penatausahaan BMN karena telah menghasilkan output yang sesuai dengan laporan yang dibutuhkan.

Pengendalian internal terhadap sistem penatausahaan BMN juga sudah sesuai dengan pengendalian internal COSO. Permasalahan yang timbul dalam proses penatausahaan merupakan kendala teknis dan belum memiliki solusi untuk permasalahan tersebut. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor masih memerlukan upaya pemecahan masalah agar proses penatausahaan menjadi lebih baik dan kondisi BMN yang layak pakai secara merata di seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Kata kunci: sistem, penatausahaan, BMN, SIMAK-BMN